

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penataan berasal dari kata “tata” yang berarti aturan. Penataan merupakan hal, cara atau hasil pekerjaan menata. Menata adalah mengatur, menyusun sesuai dengan aturan dan system. Penataan berarti mengatur atau menyusun tempat yang mampu menjadi simbol yang menjembatani kebutuhan manusia dan kedudukan masa lalu dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Sedangkan sebagai sebuah proses penataan dapat langsung diarahkan pada pengertian manajemen yang berasal dari kata “*to manage*”.

Dalam penelitian ini penulis melihat beberapa referensi penelitian terdahulu yang bisa menjadi bahan acuan bagi penulis dengan tema yang serupa sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui perbedaan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu bermanfaat dalam memecahkan masalah yang timbul tata kelola pasar Motamasin di Malaka. Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis jadikan penelitian, antara lain: Pertama hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tri 2007) berjudul Analisis penerapan *Value For Money* pada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan konsep *value far money* cukup ekonomis , efisiensi dan efektivitas

Hasil dari penelitian ini adalah jika dilihat berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2002 sampai 2004 cukup ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Dilihat berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan konsep value for money, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)²cukup ekonomis dan efisiensi tetapi tidak efektivitas.

Kedua penelitian (Rizki, 20117) tentang Analisis Tata Kelola Pasar Tradisional Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Tradisional Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat) bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen Dinas Pengelolaan Pasar Koto Baru dalam mengelola pasar tradisional Koto Baru. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen Dinas Pengelolaan Pasar dan pengelolaan pasar tradisional belum sepenuhnya bisa menjalankan secara optimal, Seperti Otonomi pengelolaan, dinas Pengelolaan Pasar belum sepenuhnya bisa menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut dengan baik, hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan yang terjadi di pasar tradisional. Pada sistem pengelolaan terintegritas, dinas pengelolaan pasar belum sepenuhnya mampu dalam mengkoordinisir seluruh karyawan dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Namun demikian dinas pengelola pasar sudah mampu memaksimalkan pendapatan dari pasar tersebut, ini terlibat dari perkembangan yang

²Rizki, T. M. (20117). Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi.

terus dilakukan di pasar Perbatasan Moramasin, seperti renonasi gedung pasar, toilet dan lain sebagainya.(Rizki, 20117)

Ketiga (Khairunis idem, 2019) tentang “Tata Kelola Konflik Relokasi Di Pasar Sentral”(New Makassar Mall) bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pendekatan Keamanan, Pendekatan Demokratis dan Pendekatan Rekonsiliasi dalam penyelesaian Konflik Relokasi Pasar Sentral (New Makassar Mall).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keamanan pada relokasi pasar belum kondusif karena masih banyaknya bentrok susulan yang membuat konflik relokasi ini belum berakhir dengan baik, kepentingan dari berbagai pihak masih terus dipertahankan sehingga konflik masih tetap berlanjut. Pendekatan demokratis (resolusi konflik) yang dilakukan pemerintah dengan cara persuasif dan negosiasi menjadi media komunikasi yang dilakukan selama relokasi berjalan hingga sekarang, melalui pendekatan ekonomi pemerinta terus berusaha untuk meminimalisir konflik yang terjadi. Sedangkan pendekatan rekonsiliasi pada relokasi pasar tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan konflik belum bisa sepenuhnya berakhir damai. Tidak ada kesadaran pedagang atas tanggung jawabnya kepada pengembang yang menyebabkan timbulnya konflik dalam relokasi pasar. (Khairunis, 2019)

Penulis melihat Analisis Tata Kelola Pasar Perbatasan yang ada di Motamasin, perbatasan antara Timor-Leste dan Indonesia yang mana pelaksanaan Pasar terganggu karena di pengaruhi oleh pasar bayangan yaitu pasar nanfalus serta pembanguna pasar belum sempurna. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Malaka dengan menggunakan konsep *value for money* cukup ekonomi, efisien, efektivitas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Pemerintahan Daerah Kabupaten Malaka yaitu: data anggaran pendapatan dan pengeluaran, dan realisasi anggaran pendapatan dan pengeluaran Pemda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *value for money* (ekonomi,efisien,efektivitas). Metode analisis digunakan dalam penelitian ini metode analisis kualitatif serta melakukan pengujian kinerja.

Hasil dari penelitian ini dilihat berdasarkan jumlah pendapatan dan pengeluaran Pemerintah Daerah, pembangunan pasar belum sempurna dibangun dan terdapat pasar bayangan yaitu pasar Nanfalus. Dilihtan berdasarkan hasil pengujian kinerja dan konsep *value for money*, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah cukup ekonomi dan efesien tetapi tidak efektifitas.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Tata Kelola Pasar Perbatasan

2.2.1.1 Pengertian Tata Kelola

Istilah *Good Governance*, berasal dari bahasa Inggris yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan oleh Widrow Wilson Presiden Amerika Serikat ke 27, sekitar 125 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa pemerintah harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik.(Wijaya Pudjiarti,et,all, 2018, p. 2).

Pada awal mulanya *Good Governance* dipelajari secara sempit, yakni hanya menjadi bahan studi ilmu politik. Perkembangan tata kelola pemerintahan ternyata menambah kebutuhan pemahaman-pemahaman yang dapat mendukung tugas-tugas pemerintah yang semakin luas dan dinamik, sehingga mendorong kajian-kajian yang semakin luas pula. Oleh presiden Amerika Serikat ke 27 Woodrow Wilson, ditangkap secara tegas sebagai suatu keadaan yang harus ditanggapi oleh semua negara-negara di dunia. Sebagai seorang yang tadinya berprofesi akademisi, sangatlah paham dengan kebutuhan itu, sehingga dicanangkannya *Good Governance* sebagai asas pelaksanaan pemerintahan. Oleh lembaga-lembaga donor kaliber dunia, seperti: *World Bank*, *United Nation Development Program*, dan *Asian Development Bank*, *Good Governance* dimasukkan sebagai program dalam rangka pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia. (Wijaya Pudjiarti, et, all, 2018, p. 12)

Sebagai negara penerima bantuan, maka diwajibkan untuk melaksanakan *Good Governance* sebagai jalan untuk terbukanya pasar bebas sebagaimana telah menjadi harapan negara-negara global player. Negara-negara tersebut mempunyai kepentingan berinvestasi tetapi akan selalu terhambat dengan pemerintahan yang belum *Good Governance*, karena pemerintahan belum *Good Governance*, maka tidak memberi jaminan keamanan terhadap investasi. Oleh karena itu, melalui lembaga-lembaga donor internasional, disusunlah program yang memberikan dorongan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Wijaya Pudjiarti, et, all 2018, p. 13)

Menurut World Bank, *governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and sosial resources for development sociey*”. Dengan

demikian *governance* adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. UNDP mengartikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation affair at all levels*”. Kata *governance* diartikan sebagai penggunaan pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, merumuskan arti *Good Governance* sebagai berikut: pemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akutabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. (Abdul Manaf, 2016)

Sejak akhir tahun 1980-an, istilah *governance* mulai digunakan untuk pengertian yang berbeda. Menurut Rhodes dalam Pratikno Penggunaan istilah *governance* digunakan untuk menegaskan perlunya arah dan semangat baru reformasi pemerintahan. Istilah *governance* telah digunakan untuk menegaskan signifikan perlunya perubahan proses, metode dan capaian pemerintahan. (Andi Luhur Prianto, 2011)³

³Abdul Manaf. (2016). *Modul Materi “Good Governance dan Pelayanan Publik.”* Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepuitan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penggunaan istilah *governance* sebagai konsep yang berbeda dengan *government*, mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989. Dalam laporannya yang sangat terkenal yang berjudul “Sub Saharan Africa: *From Crisis to Sustainable Growth*”. Dalam laporan ini, Bank Dunia mendefinisikan *governance* sebagai “*exercise of political power to manage nation*”. Selanjutnya, laporan ini menekankan bahwa legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor negara (Pemerintah), bisnis dan *civil society* harus bersinergi membangun konsensus, dan peran Negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas fasilitatif. Oleh karena itu, Abrahamsen dalam Wiratraman menjelaskan legitimasi politik dan konsensus yang menjadi pilar utama bagi *Good Governance* versi Bank Dunia ini hanya bisa dibangun dengan melibatkan aktor non-negara yang seluas-luasnya dan melimitasi keterlibatan negara (pemerintah). (Andi Luhur Prianto, 2011)

Dengan merujuk pada kasus Afrika, argumen di seluruh laporan ini menekankan pemerintah adalah sumber kegagalan pembangunan. Oleh karena itu, untuk membangun pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus dikurangi (*less government*). Pemerintahan yang besar (*big government*) akan menjadi sumber dari pemerintahan yang buruk (*bad governance*). Pemerintahan yang buruk ini, dalam operasi-onalisasi Bank Dunia menurut Weiss dalam Praktikno adalah pemerintahan yang tidak representatif serta sistem non-pasar yang tidak efisien, yang dalam prakteknya menjadi sumber kegagalan pembangunan di Afrika. (Andi Luhur Prianto, 2011)

Sejak saat itulah awal mula gelombang penyuntikan dalam upaya memberantas ‘penyakit’ di dunia ketiga dilakukan, dengan cara mewajibkan sejumlah persyaratan-persyaratan dari Bank Dunia (yang kemudian diikuti oleh lembaga dan negara donor lainnya). Wacana yang diinisiasi oleh Bank Dunia ini terus menggelinding, yang kemudian membuat *good governance* menjadi slogan yang populer, termasuk di Indonesia. Ide utama yang melihat pemerintah sebagai sumber masalah dari pada sebagai solusi ini terus merambah, dan melahirkan pendefinisian *governance* yang lebih menekankan pada peran aktor-aktor di luar pemerintah. (Andi Luhur Prianto, 2011)

Menurut Sadjijon *good governance* mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut IAN & BPKP yang dimaksud dengan *good governance* adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, merumuskan arti *good⁴ governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. (Neneng Siti Maryam, 2016)

⁴Neneng Siti Maryam. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>

Menurut dokumen *United Nations Development Programme* (UNDP), tata pemerintahan adalah: “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Namun untuk ringkasnya, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.(Neneng Siti Maryam, 2016)

2.2.1.2 Ciri-Ciri Tata Kelola

Ciri-ciri *good governance* Menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sumarto Hetifa(2003, p. 3) yaitu:

- 1) Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- 2) Menjamin adanya supremasi hukum.
- 3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- 4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan

2.2.1.3 Prinsip-Prinsip Tata Kelola

United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara dalam (Muhammad Ilham Arisaputra, 2013) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut:

1. *Participation*

Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of Law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3. *Transparancy*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “*stakeholders*”.⁵

⁵Muhammad Ilham Arisaputra. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2).

5. *Consensus Orientation.Good Governance*

Menjadi perantara yang berbeda untuk kepentingan memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. *Equity*

Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. *Effectiveness and Efficiency.*

Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

8. *Accountability.*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga “stakeholders”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. *Strategic Vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini

2.2.1.4 Aktor Tata Kelola

Aktor-aktor *good governance* menurut Sedarmayanti(2009, p. 280⁶), antara lain:

- 1) Negara Pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan - kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam padar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme padar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam padar dapat dihindari.
- 2) Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem padar, seperti: industri pengolahan perdagangan,

⁶Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju.

perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah swasta.

- 3) Masyarakat Madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga independent yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati/ Walikota dan DPRD.

Good governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *good governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.2.2 Value For Money

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: *ekonomi*, *efisiensi* dan *efektivitas*. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada sektor organisasi pemerintah. *Value for money* merupakan nilai untuk uang yang artinya dimana nilai uang untuk menilai biaya suatu produk atau layanan terhadap kualitas penyediaan. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai *Value for money*, yaitu: ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektivitas (berhasil guna) tercapai tujuan dan sasaran. (Rahayu, 2018, pp. 21–22)

Menurut Mahmudi, *Value for money* (VRM) merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. Meskipun sama-sama menggunakan kata *Value for money*, konsep *value for money* sangat berbeda pengertiannya dengan konsep *value of money*. *Time is money* memiliki pengertian bahwa nilai uang bisa berubah dengan adanya perubahan waktu, sedangkan *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang, hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. *Value for money* merupakan kunci pengukuran kinerja sektor publik, maka sistem pengukuran kinerja sektor publik juga harus difokuskan untuk mengukur ekonomis, efisiensi dan efektivitas (Rahayu, 2018, p. 22)

2.2.2.1 Penilaian Kinerja Berdasarkan *Value For Money*

Penilaian kinerja berdasarkan *value for money* menurut Mahmudi (2007:81) adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Pengukuran kinerja *value formoney* merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Pemerintah sebagai wakil rakyat yang dipercaya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Negara harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan dana publik apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Tujuan pelaksanaan *valuefor money* adalah, Ekonomi; hemat, cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Efisiensi; Berdaya guna dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas; berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. (Yulitiawati, 2006, p. 97)

2.3.3 Ekonomi

Ekonomis adalah perolehan sumber daya(input) tertentu dengan harga yang rendah. Ekonomis terkait sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisi *input resources* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Menurut Mahmudi Ekonomis adalah terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh input dengan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional. Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran- pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Tingkat ekonomis

diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja (Yulitiawati, 2006, pp. 97–98)

Menurut Indra Bastian (2006 : 77), Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik meminimalisir *input resources* yang digunakan dengan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Indikator ekonomi merupakan indikator tentang menggunakan input, ekonomi juga bisa diartikan sebagai praktek pembelian dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik (*spendingless*), ekonomis sering disebut kehematan yang mencakup juga mengelolah secara hati-hati atau cermat tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian pada hakekatnya ada pengertian serupa antara efisiensi dan ekonomis, karena kedua-duanya penghapusan dan penurunan biaya (*cost reduction*). Terjadinya peningkatan biaya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Manfaat dari ekonomis, yaitu : dengan menghindari pengeluaran yang berlebihan pada organisasi yang dapat menimbulkan kegiatan yang tidak produktif pada organisasi, di samping itu juga organisasi dapat menilai sejauh mana organisasi dapat meminimalisir biaya yang digunakan. Secara umum ekonomis adalah untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik tersebut

2.3.4 Efisien

Efisiensia adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang dibeli organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Mardiasmo (Yulitiawati, 20⁷06, p. 77)(2009:4). Efisiensi merupakan perbandingan antara output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan suatu organisasi kegiatan.

Menurut Indra Bastian (2006: 77). Efisiensi merupakan hal-hal ketiga tersebut. Secara *absolut* rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Namun berbagai program di dua perusahaan dalam industri yang sama, dapat di bandingkan tingkat efisiensinya. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan yang serendah-rendahnya (*spending well*) efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasa *value for money*. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang di terima. Manfaat yang ada dalam efisiensi, yaitu; dapat menetapkan standar kerja yang tepat bagi perusahaan dalam peningkatan

⁷Yulitiawati. (2006). *Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU*. 97–98.
<http://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/view/966%0Ahttps://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/download/966/640>

kinerja yang lebih baik, di samping itu juga organisasi dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, dengan penggunaan biaya yang serendah-rendahnya dan menghasilkan tingkat keluaran yang optimal. Secara umum efisiensi adalah untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat masukan (input) yang kemudian akan dibandingkan dengan tingkat keluaran (output) organisasi sektor publik tersebut.

2.3.5 Efektivitas

Indra Bastian (2006:280) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. (Tri, 2007, p.⁸ 21)

Dalam rangka mencapai tujuan, organisasi sektor publik sering kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti ini yang biasa terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan bagian indikator hasil Indra Basrian (2006 : 208). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut yang telah ditetapkan. Teknik

⁸Tri. (2007). *Pengaruh Value For Money (Efisiensi Dan Efektivitas) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah rasio efektivitas. Rasio ini mengambarkan perbandingan antar realisasi pendapatan dengan targetnya, Efektivitas bermanfaat untuk mengetahui program atau kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dicapai oleh perusahaan dan apa saja yang telah berhasil dilakukan oleh perusahaan dalam target yang telah ditetapkan. Secara umum efektivitas adalah untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat keluaran(output) dari organisasi sektor publik dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. (Tri, 2007, pp. 20–23)

2.3.6 Pasar

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan.

Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah

yang diperdagangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di pasar. Para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.